

ANALISA SISTEM PENCARIAN DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT) PADA WEBSITE KPU

Agung Darmawan¹, Asruddin², Detin Sofia³, Mirza Sutrisno⁴, Rezza Anugrah M.⁵, Vicky Mahendra⁶

*Program Studi Magister Ilmu Komputer, Program Pascasarjana, Universitas Budi Luhur
Jl. Raya Ciledug, Petukangan Utara, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan 12260*

Telp. (021) 5853753, Fax. (021) 5869225

Email : ¹darmawanagung788@gmail.com, ²1711601268@student.budiluhur.ac.id,

³sofia.detin@gmail.com, ⁴mirzaindonesia@gmail.com,

⁵rezza.anugrahm1@gmail.com, ⁶1711601557@student.budiluhur.ac.id

ABSTRAK

Indonesia merupakan negara yang menerapkan sistem demokrasi, dimana setiap rakyat memiliki hak setara untuk mengambil keputusan salah satunya dalam pemilihan umum untuk menetapkan pemimpin dalam suatu wilayah ataupun memimpin negara. setiap warga negara memiliki hak pilih yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT). Daftar Pemilih Tetap dapat dipastikan pada website Komisi Pemilihan Umum dengan menginputkan Nama dan NIK. Namun pada website tersebut terdeteksi adanya ketidaksesuaian output dengan data yang di input serta terdapat data tidak sesuai dengan kode wilayah yang ditetapkan oleh PERMENDAGRI Nomor 137 Tahun 2017. Perlu adanya perbaikan pada sistem ataupun perbaruan database sehingga data Daftar Pemilih Tetap yang tidak valid terhapus dan kecil kemungkinan data tersebut disalahgunakan oleh pengguna yang tidak bertanggung jawab. Metode yang digunakan adalah SQL Injection dengan tujuan menganalisa kelemahan sistem.

Kata Kunci— Daftar Pemilih Tetap (DPT), Database, Website, SQL Injection

I.PENDAHULUAN

Tugas utama Komisi Pemilihan Umum berdasarkan UU No. 48 Tahun 2008 tentang Pemilu. Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa “keadautan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan sesuai dengan Konstitusi.” Berusaha memberikan uraian tentang hak-hak sebagai konsekuensi dari keberadaan Hak Asasi manusia sebagai ciptaan Tuhan. Hak-hak ini bersifat bawaan (natural) dalam arti yang menciptakan dan menginspirasi pikiran dan pendapat manusia, setiap orang yang dilahirkan dengan hak-hak itu, hak-hak itu dimiliki oleh manusia dalam keadaan alamiah (state of nature) dan kemudian dibawa dalam kehidupan sosial. Hak normatif, hak politik warga negara untuk memilih “telah dijamin oleh keputusan Mahkamah, tetapi dalam implementasinya masih harus dipelajari secara mendalam.

Pemutakhiran data dan daftar pemilih telah diatur dalam peraturan KPU No. 4 tahun 2015 tentang daftar pemilih tetap. dalam hal ini KPU merilis data tersebut dalam situs <https://lindungi hakpilihmu.kpu.go.id>. Open data pada menu dashboard dapat dilihat seluruh jumlah DPT se Indonesia. Namun ditemui beberapa permasalahan tentang kevaliditasan data ketika diuji dengan mengentri nama dan NIK.

II.LANDASAN TEORI

A. SEJARAH PEMILU 1955

Merupakan PEMILU yang pertama dalam sejarah bangsa Indonesia. Waktu itu Republik Indonesia berusia 10 tahun. Kalau dikatakan Pemilu merupakan syarat minimal bagi adanya demokrasi, apakah berarti selama 10 tahun itu Indonesia benar-benar tidak demokratik? Tidak mudah juga menjawab pertanyaan tersebut. Yang jelas, sebetulnya sekitar tiga bulan setelah kemerdekaan diproklamasikan oleh Soekarno dan Hatta pada 17 Agustus 1945, pemerintah waktu itu sudah menyatakan keinginannya untuk bisa menyelenggarakan Pemilu pada awal tahun 1946. Hal itu dicantumkan dalam Maklumat X, atau Maklumat Wakil Presiden Mohammad Hatta tanggal 3 Nopember 1945, yang berisi anjuran tentang pembentukan partai-partai politik. Maklumat tersebut menyebutkan, Pemilu untuk memilih anggota DPR dan MPR akan diselenggarakan bulan Januari 1946. Kalau kemudian ternyata Pemilu pertama tersebut baru terselenggara hampir sepuluh tahun setelah kemudian tentu bukan tanpa sebab.^[1]

B. PEMILU

“Pemilu adalah sarana pelaksanaan keadautan rakyat untuk memilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden dan untuk memilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.”^[2]

C. KPU

“KPU adalah lembaga Penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri dalam melaksanakan Pemilu..”^[3].

D. DAFTAR PEMILIH

“Daftar Pemilih adalah data Pemilih yang disusun oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota berdasarkan hasil penyandingan Data Pemilih Tetap Pemilu atau Pemilihan terakhir yang dimutakhirkan secara berkelanjutan dengan DP4 untuk selanjutnya dijadikan bahan dalam melakukan pemutakhiran.”^[4]

D. SISTEM

“Secara sederhana, suatu sistem dapat diartikan sebagai kumpulan atau himpunan dari unsur, komponen, atau variabel yang terorganisasi saling berinteraksi, saling tergantung satu sama lain, dan terpadu.”^[5]

E. DATABASE

“Basis data (*database*) adalah suatu pengorganisasian sekumpulan data yang saling terkait sehingga memudahkan aktivitas untuk memperoleh informasi. Untuk mengelola basis data diperlukan perangkat lunak yang disebut *Database Management System* (DBMS). DBMS adalah perangkat lunak sistem yang memungkinkan para pemakai membuat, memelihara, mengontrol dan mengakses basis data dengan cara yang praktis dan efisien.”^[6].

F. WEBSITE

“Website adalah keseluruhan halaman-halaman web yang terdapat dalam sebuah domain yang mengandung infomasi”^[7].

G. SQL Injection

“SQL Injection is one of the many web attack mechanisms used by hackers to steal data from organizations.”^[8].

III. ANALISA SISTEM

A. User Interface (UI)

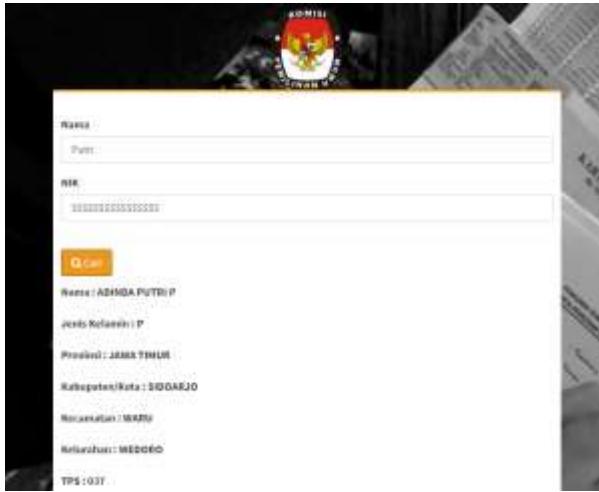
Pada saat mengakses alamat situs KPU dengan subdomain lindungi hak pilihmu <https://lindungihakpilihmu.kpu.go.id> maka user akan disuguhkan dengan tampilan antar muka untuk mengecek data DPT berdasarkan Nama dan NIK dari pemilih yang telah terdaftar pada daftar pemilih tetap KPU serta Dashboard seluruh jumlah DPT yang ada di Indonesia yang telah terkan pada sistem ini. Berikut tampilan antar muka pengaksesan utam (landing page).



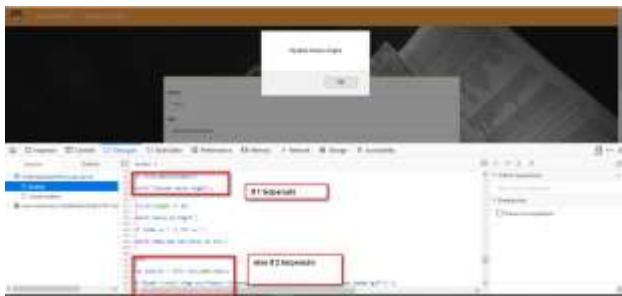
Untuk melihat jumlah DPT seluruh Indonesia maka user dapat mengakses menu dashboard. Berikut tampilan antar muka menu dashboard.

No	PARTAI	JUMLAH DPT	DELEGASI	KALAHARI	HAK	AKTIVITAS	PENGAWAS	TOTAL PEMILIH	
								REGISTRASI	DAFTAR
1	PKB	11	100	0007	120000	000000	000000	120000	000000
2	DEMOKRATIK	10	000	0000	000000	000000	000000	000000	000000
3	DEMOKRATISASI	00	000	0000	000000	000000	000000	000000	000000
4	PSI	00	000	0000	000000	000000	000000	000000	000000
5	PD	00	000	0000	000000	000000	000000	000000	000000
6	INDONESIA	00	000	0000	000000	000000	000000	000000	000000
7	DEMOKRATISASI	00	000	0000	000000	000000	000000	000000	000000
8	DEMOKRATISASI	00	000	0000	000000	000000	000000	000000	000000
9	DEMOKRATISASI	00	000	0000	000000	000000	000000	000000	000000
10	DEMOKRATISASI	00	000	0000	000000	000000	000000	000000	000000
11	DEMOKRATISASI	00	000	0000	000000	000000	000000	000000	000000
12	DEMOKRATISASI	00	000	0000	000000	000000	000000	000000	000000
13	DEMOKRATISASI	00	000	0000	000000	000000	000000	000000	000000
14	DEMOKRATISASI	00	000	0000	000000	000000	000000	000000	000000
15	DEMOKRATISASI	00	000	0000	000000	000000	000000	000000	000000
16	DEMOKRATISASI	00	000	0000	000000	000000	000000	000000	000000
17	DEMOKRATISASI	00	000	0000	000000	000000	000000	000000	000000
18	DEMOKRATISASI	00	000	0000	000000	000000	000000	000000	000000
19	DEMOKRATISASI	00	000	0000	000000	000000	000000	000000	000000
20	DEMOKRATISASI	00	000	0000	000000	000000	000000	000000	000000
21	DEMOKRATISASI	00	000	0000	000000	000000	000000	000000	000000
22	DEMOKRATISASI	00	000	0000	000000	000000	000000	000000	000000
23	DEMOKRATISASI	00	000	0000	000000	000000	000000	000000	000000
24	DEMOKRATISASI	00	000	0000	000000	000000	000000	000000	000000
25	DEMOKRATISASI	00	000	0000	000000	000000	000000	000000	000000
26	DEMOKRATISASI	00	000	0000	000000	000000	000000	000000	000000
27	DEMOKRATISASI	00	000	0000	000000	000000	000000	000000	000000
28	DEMOKRATISASI	00	000	0000	000000	000000	000000	000000	000000
29	DEMOKRATISASI	00	000	0000	000000	000000	000000	000000	000000
30	DEMOKRATISASI	00	000	0000	000000	000000	000000	000000	000000
31	DEMOKRATISASI	00	000	0000	000000	000000	000000	000000	000000
32	DEMOKRATISASI	00	000	0000	000000	000000	000000	000000	000000
33	DEMOKRATISASI	00	000	0000	000000	000000	000000	000000	000000
34	DEMOKRATISASI	00	000	0000	000000	000000	000000	000000	000000
35	DEMOKRATISASI	00	000	0000	000000	000000	000000	000000	000000
36	DEMOKRATISASI	00	000	0000	000000	000000	000000	000000	000000
37	DEMOKRATISASI	00	000	0000	000000	000000	000000	000000	000000
38	DEMOKRATISASI	00	000	0000	000000	000000	000000	000000	000000
39	DEMOKRATISASI	00	000	0000	000000	000000	000000	000000	000000
40	DEMOKRATISASI	00	000	0000	000000	000000	000000	000000	000000
41	DEMOKRATISASI	00	000	0000	000000	000000	000000	000000	000000
42	DEMOKRATISASI	00	000	0000	000000	000000	000000	000000	000000
43	DEMOKRATISASI	00	000	0000	000000	000000	000000	000000	000000
44	DEMOKRATISASI	00	000	0000	000000	000000	000000	000000	000000
45	DEMOKRATISASI	00	000	0000	000000	000000	000000	000000	000000
46	DEMOKRATISASI	00	000	0000	000000	000000	000000	000000	000000
47	DEMOKRATISASI	00	000	0000	000000	000000	000000	000000	000000
48	DEMOKRATISASI	00	000	0000	000000	000000	000000	000000	000000
49	DEMOKRATISASI	00	000	0000	000000	000000	000000	000000	000000
50	DEMOKRATISASI	00	000	0000	000000	000000	000000	000000	000000
51	DEMOKRATISASI	00	000	0000	000000	000000	000000	000000	000000
52	DEMOKRATISASI	00	000	0000	000000	000000	000000	000000	000000
53	DEMOKRATISASI	00	000	0000	000000	000000	000000	000000	000000
54	DEMOKRATISASI	00	000	0000	000000	000000	000000	000000	000000
55	DEMOKRATISASI	00	000	0000	000000	000000	000000	000000	000000
56	DEMOKRATISASI	00	000	0000	000000	000000	000000	000000	000000
57	DEMOKRATISASI	00	000	0000	000000	000000	000000	000000	000000
58	DEMOKRATISASI	00	000	0000	000000	000000	000000	000000	000000
59	DEMOKRATISASI	00	000	0000	000000	000000	000000	000000	000000
60	DEMOKRATISASI	00	000	0000	000000	000000	000000	000000	000000
61	DEMOKRATISASI	00	000	0000	000000	000000	000000	000000	000000
62	DEMOKRATISASI	00	000	0000	000000	000000	000000	000000	000000
63	DEMOKRATISASI	00	000	0000	000000	000000	000000	000000	000000
64	DEMOKRATISASI	00	000	0000	000000	000000	000000	000000	000000
65	DEMOKRATISASI	00	000	0000	000000	000000	000000	000000	000000
66	DEMOKRATISASI	00	000	0000	000000	000000	000000	000000	000000
67	DEMOKRATISASI	00	000	0000	000000	000000	000000	000000	000000
68	DEMOKRATISASI	00	000	0000	000000	000000	000000	000000	000000
69	DEMOKRATISASI	00	000	0000	000000	000000	000000	000000	000000
70	DEMOKRATISASI	00	000	0000	000000	000000	000000	000000	000000
71	DEMOKRATISASI	00	000	0000	000000	000000	000000	000000	000000
72	DEMOKRATISASI	00	000	0000	000000	000000	000000	000000	000000
73	DEMOKRATISASI	00	000	0000	000000	000000	000000	000000	000000
74	DEMOKRATISASI	00	000	0000	000000	000000	000000	000000	000000
75	DEMOKRATISASI	00	000	0000	000000	000000	000000	000000	000000
76	DEMOKRATISASI	00	000	0000	000000	000000	000000	000000	000000
77	DEMOKRATISASI	00	000	0000	000000	000000	000000	000000	000000
78	DEMOKRATISASI	00	000	0000	000000	000000	000000	000000	000000
79	DEMOKRATISASI	00	000	0000	000000	000000	000000	000000	000000
80	DEMOKRATISASI	00	000	0000	000000	000000	000000	000000	000000
81	DEMOKRATISASI	00	000	0000	000000	000000	000000	000000	000000
82	DEMOKRATISASI	00	000	0000	000000	000000	000000	000000	000000
83	DEMOKRATISASI	00	000	0000	000000	000000	000000	000000	000000
84	DEMOKRATISASI	00	000	0000	000000	000000	000000	000000	000000
85	DEMOKRATISASI	00	000	0000	000000	000000	000000	000000	000000
86	DEMOKRATISASI	00	000	0000	000000	000000	000000	000000	000000
87	DEMOKRATISASI	00	000	0000	000000	000000	000000	000000	000000
88	DEMOKRATISASI	00	000	0000	000000	000000	000000	000000	000000
89	DEMOKRATISASI	00	000	0000	000000	000000	000000	000000	000000
90	DEMOKRATISASI	00	000	0000	000000	000000	000000	000000	000000
91	DEMOKRATISASI	00	000	0000	000000	000000	000000	000000	000000
92	DEMOKRATISASI	00	000	0000	000000	000000	000000	000000	000000
93	DEMOKRATISASI	00	000	0000	000000	000000	000000	000000	000000
94	DEMOKRATISASI	00	000	0000	000000	000000	000000	000	

B. Analisa Script (*Logical Function Nested IF*)



Ketika nama DPT diisi dengan nama PUTRI dan NIK dengan karakter \$ sebanyak 16, sistem menampilkan pop out “Input dengan Nomor”. Terjadi error script seperti gambar dibawah ini



Script tidak menggunakan if bersarang (nested if). sehingga ketika terjadi pengecekan fungsi logika if 1 terpenuhi. dan fungsi if yang ke 2 juga terpenuhi. Solusi atas kendala logical script ini adalah memberikan else if untuk logical if yang ke 2 setelah logical if yang pertama. Sehingga program akan memilih

V.KESIMPULAN

Situs KPU dengan URL <https://lindungihakpilijmu.kpu.go.id> merupakan situs resmi yang dirilis oleh KPU Pusat Republik Indonesia yang menyimpan data pemilih tetap seluruh Indonesia. Bentuk transparansi data publik dengan menunjukkan sebuah open data KPU menjadi suatu daya tarik untuk menganalisa sistem ini. Didalam implementasi nya ditemui beberapa kebocoran data baik dari database maupun fungsi script pada sistem ini. Oleh sebab itu penulis menyarankan untuk pemberian sistem baik dari sisi script logical function dan script query pemanggilan data pada database.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] <https://kpu.go.id/index.php/pages/index/MzQz>
- [2] Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
- [3] Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
- [4] Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
- [5] A.Aidi. *Sistem Informasi Manajemen*. Bogor : Penerbit In Media. 2014.
- [6] Kadir, abdul dan Triwahyuni. 2013. *Pengenalan Teknologi Informasi*. Yogyakarta: CV Andi Offset
- [7] Yuhefizar, dkk. 2009. *Cara Mudah Membangun Website Interaktif Menggunakan Content Management System Joomla (CMS)*. Jakarta : PT. Elex Media Komputindo
- [8] Sarkar, Kishor. 2018. *SQL Injection Best Method for Beginner*. Smashwords.inc